

RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**

2023

Jl. Soekarno-Hatta No. 50

Telp. 031-3095331

BANGKALAN 69116

Web : www.dispendukcapilbkl.com

eMail : dispendukcapil@bangkalankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno Hatta No. 50 Telp. (031) 3095331
B A N G K A L A N

Kode Pos 69116

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN
188.45/14/433.109/2022
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Renstra 2018-2023 dan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri/Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Surat Edaran Bersama (SEB) No.008/M.PPN/01/2007 – 050/264A/SJ, Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
 10. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor : 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Tanggal 30 Mei 2017;
17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangkalan;
18. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Nomor 188.45/20/433.109/2021 tentang Renstra Dispendukpencapil periode 2013-2018

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2023;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**



ZAKARIYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan perencanaan PD selama satu Tahun dan merupakan penjabaran per Tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan factor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, Agustus 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN



ZAKARIYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I	Pendahuluan..... 1
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Dasar Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 5
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
	Tahun 2022 8
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .. 21
2.4	Review terhadap Rancangan Awal 22
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25
Bab III	Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 27
3.1	Telaahan terhadap kebijakan Propinsi 27
3.2	Tujuan dan sasaran Renja PD 27
Bab IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 29
4.1	Program dan Kegiatan 29
Bab V	Penutup 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD), RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapak kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
 10. Peraturan Daerah Bangkalan Perubahan Nomor 3 Tahun 2021 atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76;

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 seri E);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 19/E);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2023 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja 2023 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 serta evaluasi kinerja di tahun 2022 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2018-2023 dan RKPD.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi aplikasi SIAK dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2022

Secara keseluruhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2022 sebesar Rp 8.176.308.991,- dengan 5 program dan 38 Sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp,- sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar %.

2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk rencana anggaran tahun depan yakni Anggaran tahun 2023 sesuai dengan usulan RKPD total Belanja Langsung sebesar Rp **9.566.672.291,-** terurai dalam 5 program dan 51 Subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan Kegiatan Tahun 2023, dalam menjalankan kegiatannya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dikhususkan pada bidang pelayanan administrasi kependudukan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah yang ada untuk melayani pemohon.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan untuk bidang pelayanan masih kurang memadai sehingga pelaksanaan pelayanan dilingkungan Dispenduk dan Pencapil belum bisa dikatakan pelayanan prima.

d. Minat Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan relative masih rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat mengurus penerbitan dokumen kependudukannya pada saat dibutuhkan saja.

e. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas melalui pendidikan kader, maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh PD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	6 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok3	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok32	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	24 Dok	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	145 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100	50 Org	100 Org	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	2 Lap	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	198 Lap	66 Lap	66 Lap	66 Lap	100	66 Lap	132 Lap	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	14 Lap	6 Lap	7 Lap	7 Lap	100	7 Lap	14 Lap	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	100	-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	177 Org	135 Org	21 Org	21 Org	61	135 Org	156 Org	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	4 Unit	
		Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku				172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku	
		Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	3 Jenis	
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	4 Jenis	4 Jenis				4 Jenis	4 Jenis	
		Jumlah Peralatan Penunjang Perekaman dan Pencetakan Dokumen Kependudukan	2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	2 Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	3 Unit	-			3 Unit	6 Unit	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16 Unit	2 Unit	7 Unit	7 Unit	100	2 Unit	9 Unit	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	33	1 Jenis	1 Jenis	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Kali	94 Kali	120 Kali	98 Kali	82	94 Kali	192 Kali	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun			-					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%			100%	100%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan			-					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			-					
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	100	-	5 Unit	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	5 Unit	8 Unit	-	100	-	5 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan								
	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	10 Jenis	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	39 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	26 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	95	19 Unit	38 Unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	
	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	2 Lap	
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	85%	85%	87%	87%		85%	85%	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	95%	95%	96%	96%		95%	95%	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendataan Penduduk		40 Org				40 Org		
		Jumlah jenis Data Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100		1 Jenis	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	4 Jenis	4 Jenis				4 Jenis	4 Jenis	
		Jumlah jenis dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	5 Jenis		5 Jenis				5 Jenis	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	95%	95%				95%	95%	
	Pengadaan Dokumen	Jumlah jenis dokumen	6 Jenis	3 Jenis			100	3 Jenis	6 Jenis	

	Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan								
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			1 Jenis	1 Jenis	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pindah Datang Kependudukan	135 Org	60 Org				60 Org	120 Org	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	30 Kali		12 Kali	12 Kali	100		24 Kali	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk								
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte	70%	70%	73%			70%	70%	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	95%	95%	96%			95%	95%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku				172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku	
		Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil yang tercatat			1 Jenis	1 Jenis	100			
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang disusun								
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			1 Jenis	1 Jenis	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penerbitan Penting Terkait Pencaatan Sipil	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah lokasi yang didatangi								
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	120 Org	60 Org				60 Org	60 Org	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	10 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	100		4 Lokasi	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	1 Kali	

	Sipil	Pencatatan Sipil								
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Pencatatan Sipil	72 Org	24 Org	24 Org	24 Org	100	24 Org	48 Org	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	95%	95%	96%	96%		95%	95%	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Rapat Kerjasama Pemanfaatan Kependudukan						-		
		Lembaga pengguna pemanfaatan data kependudukan yang melakukan kerjasama	20 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	100		10 Lembaga	
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Rapat Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan						317 Org		
		Jumlah Data yang Diinventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100		1 Jenis	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun								
		Jumlah dokumen tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100		1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi dan Perangkat Pendukung SIAK	95%	95%	95%			95%	95%	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peralatan SIAK yang diadakan	25 Jenis	1 Jenis	12 Jenis	11 Jenis	73.33	1 Jenis	12 Jenis	
		Jumlah Paket Fitur Aplikasi Pelayanan Publik yang diadakan			1 Paket Fitur Aplikasi					
		Jumlah Jasa Pemeliharaan SIAK yang dilaksanakan	37 Unit	2 Unit	15 Unit			2 Unit	2 Unit	
		Jumlah laporan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan				1 Laporan	
	Sosialisasi terkait pengelolaan	Jumlah peserta Sosialisasi								

	Informasi Administrasi Kependudukan	terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	1 Kali	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang dilatih	103 Org	33 Org	30 Org	30 Org	100	33 Org	63 Org	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang diadakan	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	10 Jenis	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diadakan	927 Buku	281 Buku	323 Buku	323 Buku	100	281 Buku	604 Buku	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas. Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menangani dan mengelola 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi kependudukan
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. Seksi Tata kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari
 - a. Seksi Kerjasama
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPENDUK PENCAPIL Kabupaten Bangkalan didukung oleh 94 orang Pegawai yang tersebar di masing-masing unit pelayanan, terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil, 49 orang Pegawai Honorer. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 orang PNS, Eselon III/a sebanyak 1 orang PNS, Eselon III/b sebanyak 3 orang PNS dan Eselon IV/a sebanyak 15 orang PNS.

Pembangunan bidang administrasi kependudukan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan tersedianya jaringan pelayanan (aplikasi) SIAK Online masih kurang memadai sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM bidang administrasi kependudukan dalam hal kualifikasi teknis pendidikan masih kurang

bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai/tenaga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Kedua ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu belum tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan satu pintu, hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan kepemilikan dokumen serta pengawasan dan pengendalian intern dinas masih belum terlaksana untuk capaian kinerja dinas.

Kecilnya anggaran biaya untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangkalan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan atau program tersebut secara keseluruhan, sehingga masih membutuhkan bantuan anggaran dari pusat dan propinsi demi tercapainya target SPM.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja kunci.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2022	2023	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		78	79	80	81	82	70	71.5	74.5	76	
2		Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan							70	70.5	71.5	72	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawainya. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA

2. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang, sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah komputer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Setiap pejabat struktural seharusnya memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan tugas yang diberikan atasan sehingga tidak ada antrian dalam penyelesaian tugasnya.
3. Sarana prasarana yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktifitas masyarakat keterlibatan pemerintah sangatlah penting.
5. Banyaknya masyarakat (pemohon) yang mengurus penerbitan dokumen kependudukan harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan masing-masing bidang sehingga dapat tercapai kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang optimal.
6. Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dinilai masih rendah, hal ini ditandai dengan belum optimalnya pengembangan yang digunakan dan tingkat melek masyarakat terhadap TIK serta kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah.
7. Mengikuti kebijakan yang ada pada juknis penggunaan DAK non fisk pelayanan administrasi Kependudukan yang terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya tidak diperbolehkan menggunakan anggaran DAK untuk pengadaan sarana dan prasarana juga kegiatan yang dibatasi pendanaan DAK non fisik dari Direktrat Jendral Kependudukan dan dan pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Review terhadap rancangan awal tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Bangkalan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Visi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019, adalah :

"Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas".

Misi :

1. Mengembangkan kebijakan dan system serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan;
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk

Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan adalah :

"Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

Visi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaras dengan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai, walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Sesuai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan Tahun 2023 adalah :

a. Tujuan :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

b. Sasaran :

“Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2023	2024			2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dalam Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86	86	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata Prosentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	82	82	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diiringi oleh pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas terutama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- B. Program Pendaftaran Penduduk
 - 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2. Penataan Pendaftaran Penduduk

3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- C. Program Pencatatan Sipil
1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Bangkalan	3 Dok	2.897.100	DAU	-	3 Dok	2.897.100
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kab. Bangkalan	1 Dok	-	DAU	-	1 Dok	-
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Bangkalan	1 Dok	-	DAU	-	1 Dok	-
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kab. Bangkalan	1 Dok	1.200.000	DAU	-	1 Dok	1.200.000
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kab. Bangkalan	1 Dok	1.169.900	DAU	-	1 Dok	1.169.900
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kab. Bangkalan	1 Dok	2.366.200	DAU	-	1 Dok	2.366.200
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Bangkalan	12 Dok	2.500.000	DAU	-	12 Dok	2.500.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Bangkalan	100%	4.048.881.917	DAU	-	100%	4.048.881.917
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	50 Org	4.130.750	DAU	-	50 Org	4.130.750
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kab. Bangkalan	1 Lap	1.143.800	DAU	-	1 Lap	1.143.800
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Kab. Bangkalan	66 Lap	1.733.650	DAU	-	66 Lap	1.733.650
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-

2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kab. Bangkalan	6 Lap	-	DAU	-	6 Lap	-
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan	21 Org	-	DAU	-	21 Org	-
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangkalan	1 Unit	1.95.000	DAU	-	1 Unit	1.95.000
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkalan	2 Unit	147.148.548	DAU	-	2 Unit	147.148.548
		Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain blanko KTP EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peralatan Penunjang Rekaman dan Pencetakan Dokumen Kependudukan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangkalan	-	5.000.000	DAU	-	-	5.000.000
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangkalan	7 Jenis	10.000.000	DAU	-	7 Jenis	10.000.000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangkalan	1 Jenis	8.797.250	DAU	-	1 Jenis	8.797.250
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangkalan	1 Jenis	4.500.000	DAU	-	1 Jenis	4.500.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	120 Kali	118.574.450	DAU	-	120 Kali	118.574.450
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-

	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang terlaksana							
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel yang diadakan	Kab. Bangkalan	5 Unit	-	DAU	-	5 Unit	-
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Bangkalan	8 Unit	20.000.000	DAU	-	8 Unit	20.000.000
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	1 Jenis	3.500.000	DAU	-	1 Jenis	3.500.000
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkalan	3 Jenis	110.000.000	DAU	-	3 Jenis	110.000.000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkalan	5 Jenis	1.195.670.000	DAU	-	5 Jenis	1.195.670.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Bangkalan	13 Unit	126.455.826	DAU	-	13 Unit	126.455.826
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Bangkalan	19 Unit	35.000.000	DAU	-	19 Unit	35.000.000
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Bangkalan	1 Unit	-	DAU	-	1 Unit	-
2.12.01.2.013	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	Kab. Bangkalan	1 Lap	-	DAU	-	1 Lap	-
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen	Kab. Bangkalan	87%	-	DAU	-	87%	-

		pendaftaran penduduk							
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan	96%	-	DAU	-	96%	-
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendataan Penduduk	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jenis Data Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Jenis	14.221.900	DAU	-	1 Jenis	14.221.900
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jenis dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Kab. Bangkalan	5 Jenis	890.766.726	DAU	-	5 Jenis	890.766.726
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain blanko KTP EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	4 Dokumen	100.000.000
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan	1 Jenis	-	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pindah Datang Kependudukan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	12 Kali	45.000.000	DAU	-	12 Kali	45.000.000
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte	Kab. Bangkalan	73%	-	DAU	-	73%	-
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	Kab. Bangkalan	96%	-	DAU	-	96%	-
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-

		Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil yang tercatat	Kab. Bangkalan	1 Jenis	8.372.000	DAU	-	1 Jenis	8.372.000
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Kab. Bangkalan	1 dokumen	-	-	-	-	-
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Bangkalan	1 Paket	-	-	-	1 Paket	100.000.000
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan	1 Jenis	-	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penerbitan Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah lokasi yang didatangi	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Kab. Bangkalan	4 Lokasi	25.000.000	DAU	-	4 Lokasi	25.000.000
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	1 Kali	-	DAU	-	1 Kali	-
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	24 Org	15.501.700	DAU	-	24 Org	15.501.700
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	96%	-	DAU	-	96%	-
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	Kab. Bangkalan	1 Jenis	-	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Rapat Kerjasama Pemanfaatan Kependudukan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-

		Lembaga pengguna pemanfaatan data kependudukan yang melakukan kerjasama	Kab. Bangkalan	10 Lembaga	10.500.000	DAU	-	10 Lembaga	10.500.000
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Rapat Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Data yang Diinventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	1 Jenis	27.100.000	DAU	-	1 Jenis	27.100.000
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi Kependudukan yang dikelola	Kab. Bangkalan	1 Jenis	-	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Kab. Bangkalan		-	DAU	-	-	-
		Jumlah dokumen tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	DAU	-	-	-
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi dan Perangkat Pendukung SIAK	Kab. Bangkalan	95%	-	DAU	-	95%	-
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peralatan SIAK yang diadakan	Kab. Bangkalan	12 Jenis	-	DAU	-	12 Jenis	-
		Jumlah Paket Fitur Aplikasi Pelayanan Publik yang diadakan	Kab. Bangkalan	1 Paket Fitur Aplikasi	-	DAU	-	1 Paket Fitur Aplikasi	-
		Jumlah Jasa Pemeliharaan SIAK yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan	15 Unit	-	DAU	-	15 Unit	-
		Jumlah laporan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Laporan	15.000.000	DAU	-	1 Laporan	15.000.000
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Kali	-	DAU	-	1 Kali	-
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang dilatih	Kab. Bangkalan	30 Org	7.000.000	DAU	-	30 Org	7.000.000

	Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan								
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	Kab. Bangkalan	1 Jenis	-	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang diadakan	Kab. Bangkalan	5 Jenis	-	DAU	-	5 Jenis	-
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diadakan	Kab. Bangkalan	323 Buku	13.490.000	DAU	-	323 Buku	13.490.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Rencana program dan kegiatan serta lokasi pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2023. Begitu pula dengan total pagu program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2023.

Pencantuman Indikator serta Target Kinerja pada Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah konsisten dengan RKPD Tahun 2023.

Program dan Kegiatan yang ada telah selaras dengan tujuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diharapkan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.